

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN LUAR NEGERI RRT TERHADAP MYANMAR**

Bab III, peneliti akan memaparkan bagaimana Kebijakan Luar Negeri RRT terhadap Myanmar dibawah masa pemerintah Xi Jinping. Dalam bab ini, peneliti membagi ke dalam dua sub-bab. Sub-bab yang pertama akan menjelaskan bagaimana Kebijakan Luar Negeri ekonomi RRT terhadap Myanmar. Pada sub-bab yang kedua, peneliti akan menjelaskan bagaimana Kebijakan Luar Negeri politik RRT terhadap Myanmar. Dalam bab ini, peneliti hanya akan menjelaskan Kebijakan Luar Negeri RRT terhadap Myanmar yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingannya di Myanmar.

#### **1.1 Kebijakan Ekonomi**

Dibawah masa pemerintahan presiden RRT Xi Jinping (2013-sekarang), Xi Jinping memberlakukan kebijakan luar negeri One Belt, One Road (OBOR) yang diumumkan pada akhir tahun 2013. Presiden Xi Jinping memiliki visi untuk melakukan pembangunan infrastruktur untuk dapat menghubungkan daerah perbatasan RRT dengan negara-negara tetangga. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengembangkan perekonomian di daerah perbatasan RRT dengan cara menghubungkan daerah tersebut dengan Eropa melalui Asia Tengah, rute ini disebut dengan *The New Silk Road Economic Belt*. Tujuan pembuatan OBOR adalah untuk mencapai koordinasi kebijakan di negara-negara OBOR. Untuk membangun konektivitas RRT dengan negara-negara OBOR, RRT membangun

infrastruktur, meningkatkan arus investasi dan perdagangan, melakukan promosi integrasi keuangan, serta menjalin hubungan dengan lebih baik lagi bersama negara-negara OBOR (Ramadhan, 2018, pp. 140-141).

Namun, sebenarnya tujuan utama RRT dalam kebijakan OBOR adalah untuk memiliki jalan raya, jalur kereta api, telekomunikasi melalui udara, jaringan pelabuhan di seluruh wilayah OBOR serta cadangan minyak dan gas yang berkualitas tinggi. Dalam kebijakan OBOR, RRT menyebutkan bahwa negara-negara disepanjang jalur OBOR perlu memperbaiki infrastruktur kawasan, meningkatkan fasilitas investasi dan perdagangan, membangun jaringan perdagangan bebas, memperdalam kepercayaan politik, meningkatkan pertukaran budaya. Selain itu, isi dari kebijakan OBOR juga menyebutkan bahwa negara-negara OBOR harus saling mendorong satu sama lain belajar bersama dengan tujuan perkembangan masing-masing negara. Terakhir, negara-negara OBOR juga harus saling mempromosikan perdamaian (The Belt & Road Initiative, 2016, p. 3).

Presiden Xi Jinping juga melakukan pendekatan hubungan antara RRT dengan komunitas Association of South East Asia Nations (ASEAN) melalui Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 untuk mempromosikan kerjasama maritim antara RRT dan ASEAN. Selain itu, presiden Xi Jinping juga mengajukan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendanai infrastruktur serta untuk mempromosikan integrasi ekonomi dan interkonektivitas regional. Jalur Sutra Maritim ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat hubungan Asia Tenggara dengan Asia Selatan pada keamanan perdagangan maritim. Rencana ini bertujuan untuk dapat merealisasikan rencana Jalur Sutra Kuno yang sebelumnya belum dapat terealisasikan seperti jalur kereta cepat, pelabuhan dan jalur pipa minyak dan gas

yang membentang dikawasan Asia, serta jalur kendaraan darat (Kartini, 2015, p. 134).

Jalur Sutra baru muncul berdasarkan pada perubahan struktural ekonomi menjadi “keadaan normal baru” dari pertumbuhan ekonomi Asia yang lambat sehingga akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi kawasan Asia. Terlebih, RRT memiliki perubahan startegi dalam menerapkan kebijakan luar negerinya yaitu dengan memprioritaskan hubungan dengan negara-negara tetangga RRT. Dalam hubungan antara RRT dan Asia Tenggara, RRT memiliki peranan penting pada posisinya. OBOR merupakan salah satu pilar kebijakan luar negeri RRT diwilayah Asia Tenggara, pada kenyataannya OBOR mencakup tiga negara ASEAN sebagai jalur OBORnya. Misalnya, provinsi Yunnan yang berbatasan langsung dengan Myanmar, Laos, dan Vietnam memprioritaskan konektivitas transportasi antar kawasan dengan negara-negara ASEAN. Konektivitas ini dapat memperkuat perekonomian RRT melalui tiga negara tersebut untuk dapat memperkuat RRT dalam memperoleh kepentingannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya konektivitas yang telah dicapai oleh provinsi Yunnan dan Asia Tenggara dengan adanya rangkaian jalur kereta. Jalur kereta ini melewati jalur timur pada negara Vietnam, jalur tengah ke Viantine pada negara Laos, dan jalur barat pada negara Myanmar (Kartini, 2015, pp. 135-136).

Kebijakan OBOR dianggap memiliki potensi pada pertumbuhan perdagangan RRT dan untuk mendapatkan sumber daya alam yang strategis, terutama di negara Myanmar. RRT juga telah membangun jalur akses energi untuk dapat mempermudah melakukan pengiriman minyak mentah dan gas alam dari Myanmar. Sumber daya energi yang dimiliki oleh Myanmar berpotensi dalam

mempermudah industri RRT dalam rantai produksi maupun distribusi, serta dapat memajukan pendapatan ekonomi RRT (Mustafic, 2016, pp. 156-157). Sehingga, kebijakan OBOR dianggap mampu menjadi peluang potensial bagi RRT untuk mencapai kepentingan dalam mendapatkan tambahan sumber daya energi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan energi minyak dan gas bumi melalui pembangunan pipa minyak dan gas yang di bangun di Myanmar.

## **1.2 Kebijakan Politik**

Kebijakan Luar Negeri politik dimasa pemerintahan presiden Xi Jinping memiliki sistem yang berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya. Di mana, pada masa pemerintahan Hu Jintao (2005-2013) kebijakan Luar Negeri RRT lebih menerapkan kebijakan sosial ekonomi. Konsep sosial ekonomi dimasa Hu Jintao lebih berfokus pada kesejahteraan sosial, dan meningkatkan sistem demokrasi dengan menciptakan masyarakat yang harmonis (Buhi, 2014, p. 244). Sedangkan Kebijakan Luar Negeri presiden Xi Jinping lebih meningkatkan budaya damai yang dilakukan melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Kebijakan Luar Negeri yang digunakan oleh presiden Xi Jinping lebih menganut dan meneruskan budaya tradisional secara turun menurun (Sorensen, 2015, p. 59).

Presiden Xi Jinping optimis bahwa RRT sangat mampu berkompetisi dengan dunia internasional secara maksimal, dengan cara berupaya keras untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional. Kebijakan Luar Negeri RRT menerapkan kebijakan damai yang independen. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan RRT yang lebih mandiri dan berdaulat. Untuk meningkatkan perannya di dunia internasional, RRT telah menerapkan sifat yang terbuka dan lebih modern

untuk mencapai perubahan yang lebih baik lagi (Liangyu, 2017). Pada Kebijakan Luar Negerinya, Xi Jinping menerapkan prinsip-prinsip untuk kelangsungan hidup negaranya sebagai berikut:

1. Hidup damai secara berdampingan.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.
3. Menerapkan sistem non-intervensi.
4. Menjalin kerjasama dengan negara berkembang, dan
5. Menjalin kerjasama multilateral (Swaine, n.a , pp. 4-7).

Tujuan utama dari politik Luar Negeri RRT lebih mengutamakan pada kepentingan dan kemajuan bersama dalam sebuah kerjasama. Dengan adanya kerjasama yang dijalin, RRT berharap bahwa kerjasama ini dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap negara yang bekerjasama dengan RRT. Namun, keuntungan yang didapatkan tetap dapat dirasakan oleh kedua negara. Oleh karena itu, kebijakan Luar Negeri RRT lebih mengutamakan kerjasama dengan berbagai negara di penjuru dunia termasuk negara-negara berkembang, sebagai salah satu bentuk keterbukaan RRT (Yin, 2017). Kemandirian sebuah negara merupakan landasan dasar bagi RRT untuk menyebarluaskan kiprahnya di dunia internasional. Hal ini menjadikan RRT sebagai negara yang disiplin dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negaranya. Bentuk ketegasan tersebut menjadikan salah satu karakteristik bagi kebijakan Luar Negeri RRT. Seperti halnya, konsistensi RRT untuk tidak mencampuri permasalahan domestik Myanmar dalam isu Rohingya.

Untuk menjaga hubungan baiknya dengan Myanmar, RRT memilih untuk tidak mencampuri urusan domestik negara Myanmar, terutama isu sensitif sebuah

negara. Dalam permasalahan Rohingya, RRT bersikap untuk mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Kemudian, RRT juga tidak bergabung dengan negara-negara lain yang mengecam tindakan pemerintah Myanmar. RRT juga berharap bahwa permasalahan Rohingya dapat terselesaikan melalui jalan perdamaian. RRT lebih menghargai tindakan yang dilakukan oleh Myanmar, karena Myanmar dianggap lebih berwenang dan mengerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan domestik negaranya sendiri. RRT juga beranggapan bahwa dengan campur tangan negara lain dalam permasalahan Rohingya tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, yang ada hanya dapat mempersulit dalam menyelesaikan permasalahan (Bodeen, 2017).

Di sisi lain, dukungan yang diberikan RRT terhadap pemerintah Myanmar dimanfaatkan oleh RRT untuk menggeser pengaruh Amerika dalam mencapai kepentingan luar negerinya. Adapun bentuk dukungan politik RRT terkait isu Rohingya adalah, RRT mengusulkan rencana ‘tiga fase’ untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya antara negara Myanmar dan Bangladesh. Permasalahan ini pada awalnya disebabkan karena permasalahan Rohingya membuat banyak warga Rohingya mengungsi di negara Bangladesh. Kondisi Bangladesh sendiri telah mengalami *over population*, sehingga permasalahan Rohingya ini dianggap dapat merugikan Bangladesh. Untuk itu, RRT memfasilitasi dialog perdamaian antara Myanmar dan Bangladesh (Peng, 2018).

Adapun rencana ‘tiga fase’ yang diusulkan oleh RRT adalah *pertama*, RRT mengajukan agar kedua negara melakukan gencatan senjata. *kedua*, RRT berharap bahwa masyarakat internasional harus mendukung negara Myanmar dan Bangladesh untuk dapat berhubungan dengan baik sebagai salah satu bentuk solusi

permasalahan Rohingya. *Ketiga*, terkait permasalahan Rohingya, solusi penyelesaian permasalahan tersebut harus dalam waktu jangka panjang. RRT beranggapan bahwa kemiskinan merupakan akar penyebab dari permasalahan tersebut, sehingga RRT menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Rakhine (Yamei, 2017).

Jadi, Kebijakan Luar Negeri RRT terhadap Myanmar terkait isu Rohingya adalah dengan memegang teguh prinsip Luar Negeri RRT dengan tidak mencampuri permasalahan domestik negara lain. Namun, di sisi lain RRT memberikan dukungan politik terhadap Myanmar. Salah satu dukungan politik RRT terhadap Myanmar adalah dengan mengusulkan rencana ‘tiga fase’ terhadap permasalahan Myanmar-Bangladesh. Bagi RRT upaya yang dilakukan ini merupakan hal yang dilakukan untuk dapat meningkatkan citranya di Myanmar dan dapat meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. RRT menganggap bahwa negara Myanmar adalah komponen kunci dari jangkauan strategis RRT ke Samudera Hindia. Mengingat kedua negara juga saling membutuhkan satu sama lain dan hubungan kedua negara cenderung terus bergerak tiap tahunnya. Selain itu, RRT juga bertujuan untuk mendominasi pengaruhnya di Myanmar.